

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Desiana Wati et al (2014), Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan

akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak

semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Menurut Rahayu et al, (2014) Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi.

Standar akuntansi pemerintah, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disesuaikan berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran

kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. (Sartika Dewi, 2015).

Menurut Ari Udiyanti et al,(2014) Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009) adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan,

efisien dan ekonomis atas suatu kegiatan operasi dan melakukan alokasi sumberdaya kepada organisasi yang dipercaya serta memberikan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan secara tepat dan efisien. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Wati et al (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah letak objek yang saya teliti dan menambahkan satu variabel, pada penelitian ini objek yang saya gunakan adalah Dinas di OPD pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, oleh karena itu judul penelitian ini adalah PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo ?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo?
3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada dinas OPD Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan referensi untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan masing-masing daerah dalam kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penelitian

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan variabel, metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.